



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk menilai pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025 ini kami mengharapkan adanya masukan berupa saran-saran perbaikan agar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun yang akan datang dapat lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Palu, 01 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



Moh. RIFANI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Isu–Isu Strategis	9
1.4 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP.....	10
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Struktur program Perangkat Daerah	15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2.4 Perjanjian Kinerja	22
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Capaian Kinerja.....	27
a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	27
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terahir.....	29
c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	31
d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.....	31
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan	32
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
g. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	34
3.2 Realisasi Anggaran	51
3.3 Inovasi	56
3.4 Penghargaan.....	56
Bab. IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	50

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja 2025
2. Lain-lain yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering 6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 6
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan 7
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 7
Tabel 1.5	Keadaan Inventaris dan Perlengkapan 8
Tabel 1.6	Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024 10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 14
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP 15
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 16
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP 20
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 23
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 27
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dan beberapa Tahun terakhir 30
Tabel 3.3	Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dala Dokumen Renstra 31
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain 34
Tabel 3.5	Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran 2025 36
Tabel 3.6	Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja 37
Tabel 3.7	Efisiemasi Penggunaan Sumber Daya 59
Tabel 3.8	Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025 berisi laporan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ditunjang capaian Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari 4 (empat) indikator yaitu Jumlah Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA) (Rp) dengan jumlah Nilai Investasi di tahun 2025 sebesar Rp 127.209.764 atau sebesar 90.86%, Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) dengan Jumlah Investor Bersekala Nasional di tahun 2025 sebesar 2.700 atau 98.18%, Kenaikan/penurunan Nilai Reaslisasi PMDN (Milyar Rupiah) dengan jumlah Realisasi di tahun 2025 sebesar 7.992 atau 173.73%, Pada tahun 2025 Rasio Daya Serap Tenaga Keja (orang/Perusahaan) dengan Realisasi investasi di tahun 2025 sebesar 18 atau 35.12%. factor Hambatan ketidak tercapaian target yaitu Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, memastikan masalah hukum di Tiongkok dan tidak menarik aset di Indonesia melalui restrukturisasi kepemilikan adalah solusi saat ini.

Oversupply & Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru hal ini merupakan hambatan tidak tercapainya target, Menghentikan pemberian izin baru untuk smelter nikel kelas II (*Nickel Pig Iron/NPI*) yang teknologinya kurang efisien dan menyebabkan surplus, Harga nikel kelas II (NPI) adalah yang paling terdampak oleh surplus. Solusinya adalah beralih ke produk nikel kelas I yang lebih bernilai tinggi, Mengalihkan sumber energi smelter dari PLTU batu bara ke sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan dalam jangka

panjang (seperti hidro atau surya), yang juga meningkatkan nilai jual produk nikel di pasar Barat (LME) serta mengurangi ketergantungan pada *London Metal Exchange* (LME) dengan menciptakan indeks harga nikel sendiri yang mencerminkan realitas pasokan nikel Indonesia sebagai produsen terbesar dunia merupakan solusi saat ini

Selain itu Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal global juga merupakan hambatan tidak tercapainya realisasi, solusi saat ini yang dapat di ambil yaitu Sentimen negatif muncul karena ketidakpastian. Solusinya adalah keterbukaan misalnya Membangun platform publik yang menampilkan data kualitas udara, pengolahan limbah (tailing), dan penggunaan air secara transparan yang dapat diakses investor, ulai mengganti sumber energi smelter dari batubara ke gas alam (LNG) atau energi terbarukan (Hydropower) sebagaimana yang mulai dijajaki di beberapa blok tambang di Sulawesi, Meningkatkan investasi pada program pengembangan masyarakat (CSR) yang substantif, bukan sekadar bantuan tunai, untuk meminimalkan konflik sosial yang sering merusak skor ESG.

Dan tidak tercapainya realisasi juga karena Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada sistem OSS RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia), solusi untuk mengatasi hambatan ini yaitu menguatkan peran DPMPTSP Provinsi/Kabupaten untuk memberikan asistensi langsung (tatap muka) bagi investor yang izinnya "tersangkut" karena bug sistem atau perubahan nomenklatur KBLI, Memastikan basis data profil pengusaha sudah terintegrasi sempurna dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Dukcapil untuk mempercepat proses *cleansing* data di awal pendaftaran, nyelenggaraan bimbingan teknis oleh Kementerian Investasi/BKPM mengenai perubahan modul dalam PP No. 28 Tahun 2025, khususnya terkait kewajiban baru bagi investasi asing (PMA), Mengaktifkan Satgas untuk menangani kasus-kasus investasi strategis yang terhambat secara administratif. Jika sistem mengalami *stuck* lebih dari waktu yang ditentukan, Satgas memiliki wewenang untuk mendorong percepatan verifikasi manual oleh kementerian terkait serta menambah beban data (dokumen persyaratan yang lebih detail), infrastruktur server di Pusat Data Nasional

(PDN) harus dipastikan mampu menangani lonjakan lalu lintas data tanpa *downtime*

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2025 sebanyak 4 (empat) yaitu Predikat A dalam SAKIP Award 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 97,89 - Zona Hijau - Kualitas Tertinggi, Mitra Asesment Bank Indonesia Sulawesi Tengah Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas Kontribusi Pelaksanaan Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah di Sulawesi Tengah, peringkat 5 pada Penganugrahaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. dengan nilai 93 sebagai Organisasi Perangkat Daerah Informatif.

Aangaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 14.979.558.910,- terealisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.311.830.381,- atau 88,74% dan realisasi fisik 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good Governance) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk mewujudkan tatakelola yang baik, maka setiap daerah harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar didasarkan pada ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, kebijaksanaan dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah
4. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong kebaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja merupakan dokumen akuntabilitas untuk pertanggungjawaban pemerintah, prestasi instansi dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program kerja dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, membandingkan antara target Kinerja (yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja/PK) dengan realisasi aktual, serta memberikan analisis capaian tersebut. LKj merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan instansi pemerintah. Mengukur, mendokumentasikan dan melaporkan hasil capaian program selama satu tahun anggaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan laporan ini sebagai perwujudan akuntabilitas atas kinerja yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 Dinas PeSnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

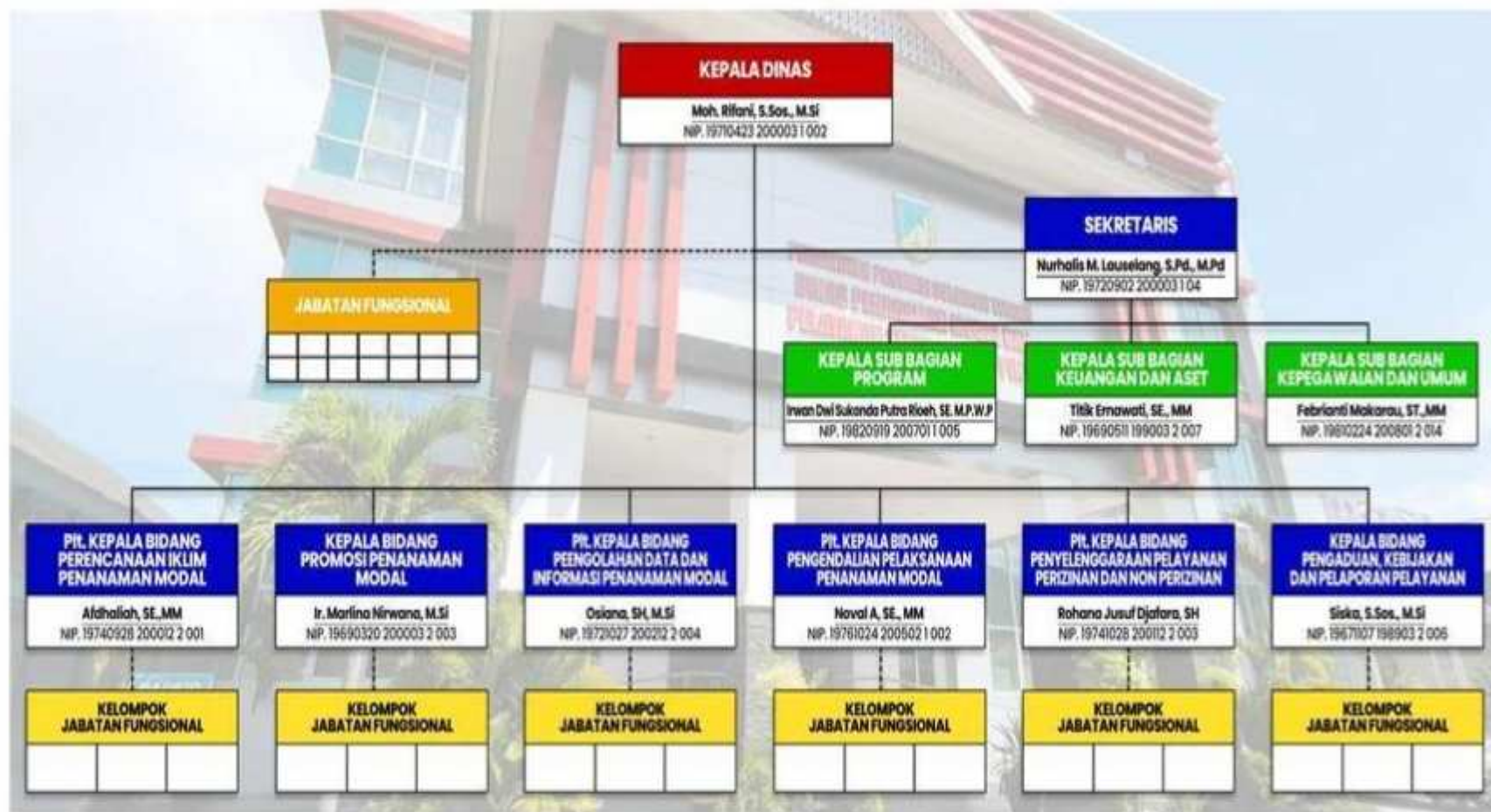
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya besaran Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal:
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Mudal
 - f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
 - g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Non Perizinan
 - Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
 - h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumber daya pegawai dengan komposisi berdasarkan eselonering sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

Eselonering	Jumlah Pegawai
Eselon II	1 Orang
Eselon III	1 Orang
Eselon IV	1 Orang
Paruh Waktu	22 Orang
Jabatan Fungsional	73 Orang
Jabatan Pelaksana	68 Orang
Honorier /Tenaga Kontrak	8 Orang
Jumlah	175 Orang

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah pegawai DPMPTSP sebanyak 175 orang, terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 1 orang, Eselon IV berjumlah 1 orang, paruh waktu berjumlah 22 orang, dan Jabatan Fungsional berjumlah 73 orang, Jabatan pelaksanaan berjumlah 68 orang dan tenaga kontrak/honorier berjumlah 8 orang.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
Golongan I	0 Orang
Golongan II	2 Orang
Golongan III	37 Orang
Golongan IV	17 Orang
Golongan IX (PPPK)	85 Orang
Golongan V (PPPK)	6 Orang
Non Golongan	28 Orang
Jumlah	175 Orang

Berdasarkan tabel 1.2, pegawai DPMPTSP terdiri dari 2 Orang Golongan II, 37 orang Golongan III, 17 orang Golongan IV, 85 orang Golongan IX (P3K), 6 orang golongan Golongan V (PPPK) dan 28 orang Non Golongan.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	6 Orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang
Jumlah	11 Orang

Berdasarkan jabatan (tabel 1.3), pegawai DPMPTSP terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 5 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, dan 15 orang Pejabat Fungsional.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D III	D I	SLTA	SMP	SD	Jumlah
0	15	129	1	0	30	0	0	175

Dari tabel 1.4, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPMPTSP yang berpendidikan S3 berjumlah 0 Orang, S2 berjumlah 15 orang, S1 berjumlah 129 orang, DIII berjumlah 1 orang, dan SLTA berjumlah 30 orang. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan upaya-upaya berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparatur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan

Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan antara lain pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS).

Keadaan inventaris dan Perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5
Keadaan Inventaris dan Perlengkapan

NO	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	1.575.408.500,00
2	Peralatan dan Mesin	10.208.558.963,00
3	Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	381.777.650,00
5	Aset tetap lainnya	73.298.850,000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset lainnya	943.881.900,00
	Jumlah	35.829.114.579,00

Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan rutin, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki sarana dan pendukung layanan Informasi Potensi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa:

- a. Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mrmfasilitasu .

Saat ini DPMPTSP Provinsi sulawesi Tengah telah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berfungsi untuk penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah. **(Pergub No. 37 Tahun 2019 Tentang MPP)**. Keberadaan MPP ini menjadikan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemerintah Provinsi ke-dua di Indonesia setelah DKI yang mempunyai Mal Pelayanan Publik, serta provinsi pertama di Indonesia yang menggabungkan pelayanan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.

b. *Mobil Layanan Keliling (Site Mobile Service)*

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah selain melayani didalam Gedung DPMPTSP juga mengoperasikan mobil layanan keliling (*Site Mobile Service*)

1.3 Isu - Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas, masih banyak masalah bersifat umum yang dihadapi. Adapun permasalahan atau isu strategis sesuai dengan Renja Tahun 2025 tersebut sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya aparatur DPMPTSP belum seluruhnya memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggarapelayanan belum optimal.
3. Belum maksimalnya penyelenggaraan event – event pameran promosi investasi.
4. Sebagian Kabupaten/Kota tata ruangnya belum dilegal formalkan sehingga peruntukan lahan di sejumlah wilayah menjadi tumpang tindih dan mempengaruhi investasi di daerah.
5. Sebagian Kabupaten/Kota belum Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, yang merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang penanaman modal.
6. Sebagian Kabupaten/Kota untuk regulasi kemudahan investasi daerah belum seluruhnya tersedia
7. Sebagian Kabupaten/Kota belum optimal menyelenggarakan pelayanan perizinan berbasis OSS

1.4 Tindak Lajut LHE AKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
1	Menyusun perencanaan kinerja dengan memberikan analisa dalam pencapaian target kinerja	Membuat analisis pencapaian kinerja	Masih Proses	Masih menganalisis pencapaian untuk tiap program	
2	Lengkapi Dokumen Rencana Aksi dengan KAK/TOR	Dokumen KAK/TOR akan dilampirkan pada Dokumen Rencana Aksi	Selesai	-	https://drive.google.com/drive/folders/1xS2AW4BPrNdAE4qxU4aYduClJE6WLO98
3	Lengkapi laporan monitoring dan evaluasi dengan permasalahan dan solusi	Menambahkan kedalam Laporan Monitoring Permasalahan dan Solusinya	Telah buat jadwal/ rencana monitoring	Koreksi untuk Perbaikan Penilaian Sakip tahun Depan, karena Laporan Monev yg telah selesai di buat belum disertai dengan kolom Permasalahan dan Solusi	https://drive.google.com/drive/folders/1x_W2td12h3FrBQVBmoNn9zoCjiYMTL_b
4	Menyusun laporan kinerja secara berkala per triwulan (3 bulan), dan lakukan monitoring dan evaluasi secara berkalas atas realisasi rencana aksi kinerja agar diketahui progress capaiannya dan ditindak lanjuti.	Laporan kinerja dibuat per triwulan	Monitoring (sesuai bulan saat ini yaitu di bulan Juli 2025)		https://drive.google.com/drive/folders/1x_W2td12h3FrBQVBmoNn9zoCjiYMTL_b

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
5	Seluruh pegawai agar merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi (membuat Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Individu seluruh Pegawai dan SKP)	Tersedianya PK,IKI dan SKP	Selesai	SKP seluruh Pegawai tersedia dalam bentuk Laporan Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1rgH-KxPmVB2IzSl1SYAa2gRZsYcHS2SY
6	Memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi dalam pengukuran kinerja	Terwujudnya Pelayanan & Evaluasi kinerja online (Bekin)	Masih Proses	Masih di sosialisasikan ke bidang-bidang	
7	Lakukan sosialisasi tentang pengukuran kinerja individu kepada seluruh pegawai.	Jadwalkan, Laporkan, Dokumentasikan Pelaporan	Buat Undangan Rapat Sosialisasikan, Laksanakan dan Dokumentasikan	Masih Menentukan waktu pelaksanaan menyesuaikan waktu dengan Pimpinan	
8	Lengkapi setiap kegiatan rapat atau pertemuan dengan notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan	Menetapkan Notulis Setiap Bidang dan Mendokumentasikan Setiap Rapat	Membuat Surat Keseluruh Bidang/Sub Bidang Untuk membuat Notulensi Rapat/Notulen	Perlunya Penunjukkan Notulen Rapat Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1xbXIZ-1NyHySf_UjAME3mHKqvdWrFWxP

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
9	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja pegawai eselon 2 dan 3 terlibat dalam pelaksanaan monev dengan bukti tanda tangan berita acara monitoring evaluasi oleh Pimpinan OPD dan masing-masing Kepala Bidang	Menugaskan Pejabat Eselon 3 Untuk Melakukan Monev dan Membuat Berita Acara Monev Tandatangani Kadis	Sementara di sosialisasikan	Masih dalam Proses sosialisasi ke Bidang-bidang	
10.	Membuat Berita Acara Hasil Monev rencana Aksi dan capaian kinerja pertriwulan dan ditandatangani oleh masing-masing kepala bidang dan seluruh pegawai.	Buat No. 9 PerTW	Sementara di sosialisasikan	Masih dalam Proses sosialisasi ke Bidang-bidang	
11.	Lakukan tindak lanjut atas seluruh Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.				

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2025 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Dalam dokumen Renstra OPD DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

**“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian Dan
Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju,
Sejahtera dan Berkelanjutan”**

Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut maka dalam prospektif jangka panjang, pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas

Tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai oleh DPMPTSP disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA						KET
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2.730	2750	2770	2790	2810	2830	2850	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/	Rp Juta	139.900.000	140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000	
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	4.590	4.600	4.610	4.620	4.630	4.640	4.650	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/	Orang/Perusahaan	50	51	52	53	54	55	56	

Strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
4. Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif;
5. Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi;
6. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah daerah;
2. Menyediakan Sarana Prasarana Pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya moubeler, wifi dan lainnya;
3. Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah melalui penerbitan regulasi dan penyusunan kajian kawasan investasi baru;
4. Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website;
5. Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi;
6. Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN, maupun non fasilitas;
7. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP

Visi	Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan			
Misi II	Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Optimalisasi Keterediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan - Menciptakan Iklim investasi yang Kondusif - Meningkatkan Promosi Potensi Daerah yang Didukung Keterediaan Data Peluang Investasi - Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Mengembangkan dan Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Daerah - Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Terkait Urusan Operasional Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan - Menciptakan Iklim Investasi Kondusif yang Berkelanjutan di Daerah - Mengembangkan Kegiatan Promosi dan Layanan Promosi Digital - Menyiapkan Data Potensi Unggulan Daerah untuk Peluang Investasi - Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dengan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis LKPM Secara Berkesinambungan - Akselerasi Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN - Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis IT yang Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan

2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2025 DPMPTSP dilaksanakan melalui 6 (Enam) program yang terdiri dari 15 (Lima Belas) kegiatan dan 36

(Tiga Puluh Enam) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2025	DPA 2025	Bertambah/ Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
			(Rp)	(Rp)	
J U M L A H					
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.643.217.154	13.709.130.510	1.633.273.707
		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.236.250	463.677.600	24.071.097
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	226.541.550	388.545.350	21.253.409
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	38.716.700	26.716.700	522.204
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.978.000	48.415.550	2.295.484
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.195.375.175	11.592.141.218	1.563.727.97
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	10.360.330.375	10.204.827.568	1.549.826.423
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.678.320.000	1.156.440.000	9.600.000
		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	20.380.650	14.997.000	626.560
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	54.503.100	118.024.100	3.076.021
		Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	31.190.600	51.383.400	56.900
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Skpd	50.650.450	46.469.150	542.070
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.523.600	87.925.050	5.767.250
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.523.600	87.925.050	5.767.250
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.324.700	20.122.200	328.461
		Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36.739.200	9.649.200	47.111
		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	71.585.500	10.473.000	281.350
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.814.855	250.509.900	16.282.910
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.606.900	33.253.700	309.640
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.830.250	45.267.200	886.840
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	320.377.705,	171.989.000	15.086.430

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Lanjutan)

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2025	DPA 2025	Bertambah/ Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
			(Rp)	(Rp)	
J U M L A H					
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.199.660	55.521.590	854.090
		Pengadaan Mebel	108.964.960	55.521.590	854.090
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.867.114	833.257.152	17.446.628
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	480.977.352	389.976.472	8.814.776
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.889.762	443.280.680	8.631.852
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.875.800,	405.975.800	4.795.297
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.939.100	262.389.100	2.558.847
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	54.056.700	62.226.700	531.700
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	53.880.000	81.360.000	1.704.750
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	590.933.000	494.622.150	4.330.202
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	117.212.800	93.778.900	566.626
		Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	10.396.150	10.103.700	0
		Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi	56.214.300	64.090.350	246.346
		Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	50.602.350	19.584.850	320.280
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	473.720.200	400.843.250	3.763.576
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	273.707.700	219.157.250	3.453.474
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	200.012.500	181.686.000	310.102
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	303.217.488	279.908.850	13.943.366
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	303.217.488	279.908.850	13.943.366
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	257.712.438	237.508.650	11.699.866
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	45.505.050	42.400.200	2.243.500

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Lanjutan)

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2025	DPA 2025	Bertambah/ Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
			(Rp)	(Rp)	
J U M L A H					
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang berkualiatas	PROGRAM PELAYANAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	281.903.700	509.676.150	7.620.518
		Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	241.903.700	464.000.600	7.620.518
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	174.890.400	227.210.100	5.367.525
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan BerusahaBerbasis Risiko	40.634.650	166.194.500	231.455
		Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	26.378.650	70.596.000	2.021.538
		Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	40.000.000	45.675.550	0
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40.000.000	45.675.550	0
		POGRAM PENGENDALI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	145.928.450	262.968.900	5.716.416
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	145.928.450	262.968.900	5.716.416
		Pengawasan Penanaman Modal	103.789.500	96.089.950	5.067.020
		Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	5.038.950	29.208.950	226.960,0
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	37.100.000	137.670.000	422.436
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	68.065.250	350.317.250	2.844.320
		Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	68.065.250	350.317.250	2.844.320
		Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	68.065.250	350.317.250	2.844.320

Sasaran pertama, Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN dilaksanakan melalui 5 (lima) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal serta terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.270.428.400,- dan bertambah sebesar Rp.746.684.388,- menjadi Rp. 2.017.112.788,- pada anggaran perubahan 2025.

Selain program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran, juga dilaksanakan 1 (satu) program pendukung. Program pendukung ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Program pendukung pencapaian sasaran tahun 2025 yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total anggaran Rp. 14.643.217.154,- dan berkurang Rp. 93.4086.644,- menjadi Rp. 13.709.130.510,- pada anggaran perubahan 2025.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021- 2026 mempunyai 3 Indikator Utama. *Indikator pertama*, jumlah nilai investasi bersekala nasional (PMA/PMDN). Indikator ini dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan PMDN/PMA.

Indikator Kedua, jumlah investor bersekala nasional (PMA/PMDN). Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah proyek PMA/PMDN yang berinvestasi.

Indikator Ketiga, adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat (Penggunaan Layanan Perizinan) terhadap pelayanan perizinan yang diberikan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Thun 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	A		3	4	5	6	7	
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	31.750.000.000.000	33.750.000.000.000	35.750.000.000.000	37.750.000.000.000	39.750.000.000.000	41.750.000.000.000	41.750.000.000.000
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	345	403	461	519	577	635	635
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25% - 100% (Sangat Baik)	93% (Sangat Baik)	94% (Sangat Baik)	95% (Sangat Baik)	96% (Sangat Baik)	97% (Sangat Baik)	97% (Sangat Baik)

Pada RENSTRA tahun 2025 – 2029 terdapat 4 (empat) Indikator Utama (IKU). *Indikator Pertama*, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah

Indikator kedua, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan PMDN/PMA di wilayah Sulawesi tengah

Indikator ketiga, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Indikator ini dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi dari perusahaan PMDN di wilayah Sulawesi tengah

Indikator keempat, rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Thun 2025-2029 (Lanjutan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Investor (Proyek)	2.727	2.750	2.770	2.790	2.810	2.830	2.850	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	139.900.000	140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000	
		Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4.590	4.600	4.610	4.620	4.630	4.640	4.650	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/ Perusahaan)	Orang/ Perusahaan	50	51	52	53	54	55	56	

Sesuai dengan desah arsitektur, Indikator Kinerja Utama (IKU) Murni pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) murni DPMPTSP Thun 2025 (Lanjutan)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Realisasi Investasi	Ribu Rp.	95.000.000.000.000		Jumlah Nilai Investasi di Peroleh Dari Jumlah Realisasi Investasi Sulawesi Tengah yang di Release Oleh BKPM/Kementerian Investasi Setiap Triwulan

Berdasarkan IKU tahun 2025 terdapat 1 (satu) Indikator Utama yaitu meningkatnya nilai realisasi investasi. indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah Nilai Investasi di Peroleh Dari Jumlah Realisasi Investasi Sulawesi Tengah yang di Release Olen BKPM/Kementerian Investasi Setiap Triwulan.

Setelah RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 terbaru terbit maka IKU mengikuti RPJMD dan Renstra terbaru, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 berubah, perubahn IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) murni DPMPTSP Thun 2025 (Lanjutan)

No.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	FORMULA	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah Nilai Investasi Berbasis Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	Rp. Juta	140.000.000	127.896.754	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berbasis Nasional (PMDN/PMA) (Release Data BKPM)	1. KEBERHASILAN DAN TANTANGAN PENCAPAIAN TARGET : - Dukungan Finansial Investor Cetak. Uruturutan atau modal finansial pada setiap perusahaan di setiap awal periode; kemas. Jangka. Owing di (Tingkat) kontribusikan risiko operasional baru pada sisi di daerah, termasuk dukungan terhadap interkoneksi PI (G)H - Omongguy & Service Harga. Sajikan tabel global seluas 200.000 dan menyebarkan harga nilai terakur (JNEC Sulawesi), serta satu tahap awal dan investor untuk diagenasi ini produk baru - Transisi Regulasi. Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 investasi perusahaan fundamental pada sistem OSS RDA, yang pada line awal menyebarkan pelayanan administrasi perizinan terkait (Media Jarak)	Jumlah Nilai Investasi di Peroleh Dari Jumlah Realisasi Investasi Sulawesi Tengah yang di Release Oleh BKPM/Kementerian Investasi Setiap Triwulan Jumlah Nilai Investasi Berbasis Dari Jumlah Proyek yang Berkomendasi di Sulawesi Tengah Berdasarkan Release BKPM/Kementerian Investasi Setiap Triwulan Realisasi / Perolehan nilai realisasi PMDN disoroti dan pengurangan realisasi PMDN tahun realisasi dengan tahun sebelumnya. Owing realisasi PMDN sebelum tahun realisasi (Maka 100 persen Rasio daya semp tenaga kerja diperoleh dari hasil pembagian jumlah tenaga kerja perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh investor/proyek
		Jumlah Investor Berbasis Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Proyek	2.750	2.700	Jumlah Nilai Investor Berbasis Nasional (PMDN/PMA) (Release Data BKPM)		
		Kemudahan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4.681	7.962	Realisasi PMDN Teknis Evaluasi - Realisasi PMDN $\frac{\text{Tahun Sebelum Evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi}} \times 100\%$		
		Rasio Daya Semp Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang / Perusahaan	55	18	Jumlah Tenaga Kerja pada perusahaan PMA / PMDN Jumlah seluruh PMA / PMDN		

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) **P e r u b a h a n** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 terdapat 4 (empat) Indikator Utama (IKU).

Indikator Pertama, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah Realisasi Investasi Bersekala Nasional PMDN/PMA (Release Data BKPM). Jumlah Nilai Investasi di Peroleh Dari Jumlah Reaslisasi Investasi Sulawesi Tengah yang di Release Olah BKPM/Kementrian Investasi Setiap Triwulan.

Indikator kedua, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan Nilai Investor Bersekala Nasional PMDN/PMA (Release Data BKPM). Jumlah Investor Diperolsh dari Jumlah Proyek Yang Berinvestasi di Sulawesi Tengah Bedasarkan Release Olah BKPM/Kementrian Investasi Setiap Triwulan.

Indikator ketiga, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Indikator ini dihitung berdasarkan Realisasi PMDN Teknis Evaluasi-Realisasi PMDN, Tahun Sebelum Evaluasi di Bahagi Realisasi PMDN sebelum Evaluasi di Kali 100%. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN diperoleh dari pengurangan Realisasi PMDN tahun Evaluasi dengan tahun sebelumnya Dibagi Realisasi PMDN sebelum Tahun Evaluasi Dilaki 100%

Indikator keempat, rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Perusahaan di bahagi PMA/PMDN jumlah Seluruh PMA/PMDN. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja diperoleh Dari Hasil Pembahian Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan PMA/PMDN Dengan Jumlah Seluruh Investor/Proyek PMA/PMDN.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan yang ditetapkan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala DPMPTSP disajikan berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Jabatan : Pih.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA

Pih.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH


M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	- Nilai Realisasi Investasi	Rp. 95.000.000.000,00

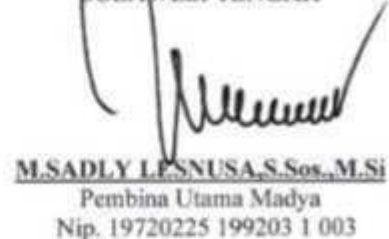
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.643.217.154,00	APBD
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 590.933.000,00	APBD
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 303.217.488,00	APBD
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 262.968.900,00	APBD
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 350.317.250,00	APBD
6. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 509.676.150,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 16.660.329.942,00	

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
 Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH


M. SADLY L. S. NUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	140.000.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2.750
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	4.600
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja(Orang/Perusahaan)	51

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.974.405.189,00	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 479.604.000,00	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 201.384.300,00	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 123.978.450,00	APBD
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 68.065.300,00	APBD
6. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 162.624.950,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 15.010.062.189,00	

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP19710423 200003 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggung jawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

3.1 Capaian Kinerja

a. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil/realisasi yang dicapai dengan target/rencana yang tertulng dalam Penetapan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatkan Nilai Investasi Yang berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2750	2700	98%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	140.000.000	127.209.764	91%
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4,600	7.992	174%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	51	18	35%

Capaian Indikator Kinerja pada Tabel 3.1 dari indikator nilai realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, serta indeks kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target investasi pada Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar Rp. 140.000.000 (RP Juta),-. Realisasi investasi pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 127.209.764.000,- dan target dengan capaian sebesar 91%, dengan rincian sebagai berikut:
 - Nilai realisasi investasi PMDN dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMDN Rp. 7.900.000.000.000,-.
 - Nilai realisasi investasi PMA dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMA Rp. 119,00.000.000.000,-.
2. Target jumlah investor berskala nasional yang berinvestasi belum dapat tercapai. Berdasarkan data perkembangan investasi tahun 2025, dari target 2.750 proyek Januari – Desember Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah menerima Laporan Kegiatan Penanaman Modal Perusahaan sebanyak 2.700 Laporan sebesar 98%.
3. Target kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN, indikator berdasarkan nilai investasi dari perusahaan PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 7.992.000.000,- dari target Rp. 4.600.- (Milyar Rupiah) dengan capaian sebesar 174%
4. Rasio daya serap tenaga kerja berdasarkan perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2025 dengan target capaian sebesar 51 Orang/Perusahaan, Realisasi sebesar 18 Orang/perusahaan dan capaian sebesar 35%.

Capaian realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 belum dapat terealisasi dikarenakan beberapa faktor penghambat yaitu: Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu

Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply & Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru, Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal global serta Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada sistem OSS RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia).

b. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kierja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Bebarapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
-1	-2	-3	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Nilai Investasi Yang berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)							2750	2700	98%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)							140.000.000	127.209.764	91%
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)							4,600	7,992	174%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)							51	18	35%

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa target akhir RENSTRA 2025 sebesar 2750 proyek Sedangkan Jumlah Capaian realisasi investor bersekala nasional (PMDN/PMA) tahun 2025 sebesar Rp. 2.700 proyek atau sebesar 98%, Jumlah nilai investasi bersekala nasional (PMDN/PMA) Target akhir RENSTRA yaitu Rp. 140.000.000 (RP Juta) pada tahun 2025 dengan capaian realisasi yaitu Rp. 127.209.764 (Milyar) atau sebesar 91%, Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) target akhir RENSTRA 2025 sebesar Rp. 4,600 (Milyar Rupiah) sedangkan jumlah capaian target sebesar Rp. 7.992 (Milyar Rupiah) atau 174%, sedangkan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) target akhir RENSTRA 2025 sebesar 51 (Orang/Perusahaan) jumlah capaian realisasi sebesar 18 (Orang/Perusahaan) atau 35%. Data sampai dengan Desember 2025

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023-2024 indikator Kinerja berbeda sehingga tidak terdapat perbandingan dari tahun sebelumnya.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	%
-1	-2	-3	-4	-6	-5	-7
1	Meningkatkan Nilai Investasi Yang berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2700	2830	98%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. Juta	127.209.764	140.400.000	91%
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	7.992	4,640	174%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	18	55	35%

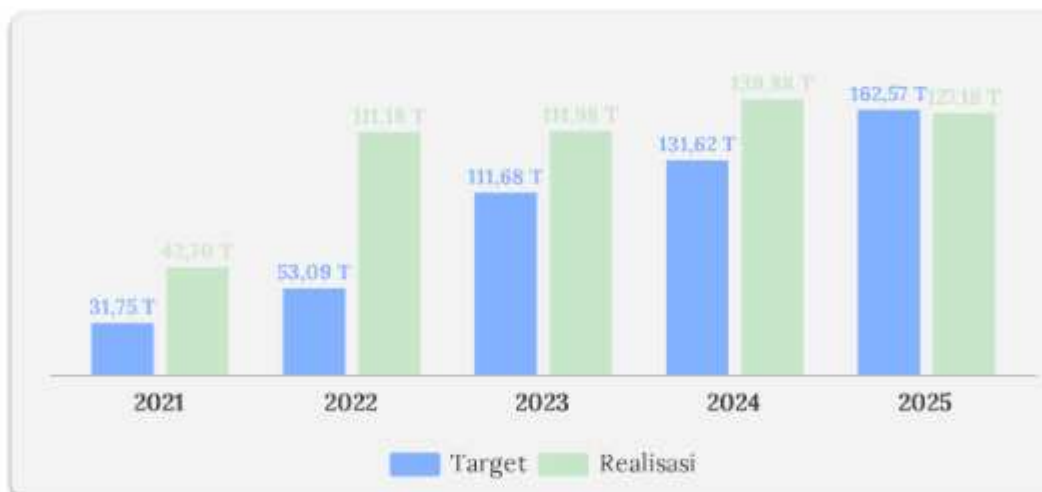
Dari table diatas memperlihatkan bahwa target akhir RENSTRA 2029 dengan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) tahun 2025 sebesar 2830 Proyek, Sedangkan Capaian realisasi investasi tahun 2025 sebesar 2700 Proyek, persentase capaian yaitu sebesar 98%. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Target akhir RENSTRA 2029 yaitu sebesar Rp. 140.400.000,- (Rp.Juta) pada tahun 2025 dengan capaian sebesar Rp. 127.209.764,- (Rp.Juta) persentase capaian sebesar 91%, Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan target RENSTRA 2029 yaitu sebesar Rp. 4,640,- (Milyar Rupiah) capaian realisasi tahun 2025 sebesar Rp. Rp. 7.992,- (Milyar Rupiah) dengan persentase capaian yaitu sebesar 174% dan target RENSTRA Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) tahun 2029 sebesar 55 orang/perusahaan, capaian Realisasi tahun 2025 sebesar 18 orang/perusahaan dengan persentase capaian yaitu sebesar 35%.

Tantangan utama yang akan di hadapi untuk mencapai target RENSTRA yaitu ketidak seimbangan kualitas Investasi yang tingginya nilai investasi tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja masal bagi penduduk lokal, resiko kebangkrutan perusahaan asing (seperti kasus Jiangsu Delong) dapat mengancam keberlanjutan proyek PMA yang sudah berjalan, sangsi lingkungan dapat merusak reputasi investasi dimata pasar global.

Guna memastikan target RENSTRA tercapa secara berkualitas rencana aksi yang akan di lakukan adalah menggeser focus promosi investasi tidak hanya pada sektor tambang/hilirisasi nikel tetapi juga pada sector manufaktur, pertanian dan pariwisata yang mampu menyerap banyak tenaga asing lokal, memberika kepatuhan lingkungan secara proaktif keda perusahaan berstandar ESG guna menarik Investasi Hijau yang lebih stabil dan berkelanjutan, mendorong kolaborasi antara investor dengan Lembaga Pendidikan agar tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dapat terpenuhi oleh SDM Daerah.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Untuk memberikan gambaran target capaian realisasi Investasi di Sulawesi Tengah 5 tahun terakhir berikut di sajikan grafik capaian tahun 2021 – 2025 sebagai berikut



Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang sangat positif dan progresif. Selama 5 (Lima) tahun terakhir DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan kecuali

proyeksi 2025 yang menjadi bahan evaluasi kedepan.

- Tahun 2021 realisasi investasi mencapai 42,70 T melampaui target Nasional yang ditetapkan sebesar 31,75 T atau capaian di atas 100%
- Tahun 2022 terjadi lonjakan dari target 53,09 T, realisasi tahun 2022 ini naik hingga 111,18 T, keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kebijakan promosi dan daya tarik investasi yang meningkat.
- Tahun 2023 ditetapkan target Nasional sebesar 111,68 T, target tersebut dapat terealisasi dengan capaian sebesar 111,98 T
- Tahun 2024 target investasi menyentuh 131,62 T, dimana realisasi Investasi dapat melebihi target yang telah ditentukan sebesar 139,88 T. Hal ini membuat investasi yang stabil
- Tahun 2025 target ditingkatkan sebesar 162,57 T atau naik sebesar 23.51 dari target Realisasi Investasi Tahun 2024 namun realisasi yang tercatat sebesar 127,18 T, persentase Realisasi Investasi terhadap target realisasi investasi Tahun 2025 sebesar 72,23%. capaian ini menjadi indikator penting untuk melakukan analisis hambatan investasi di lapangan.

Ada beberapa faktor penghambat sehingga capaian realisasi investasi tahun 2025 tidak tercapai, yaitu adanya Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply & Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru, Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan

sentimen negatif di pasar modal global serta Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada sistem OSS RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia).

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Standar Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional/Daerah Lain	Lebih Tinggi/Rendah
-1	-2	-3	-4	-5	-6=4-5
1	Meningkatkan Nilai Investasi Yang berkualitas	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	127,209,764	1,931,200,000	1.803.990.236

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Semangat disiplin bukan hanya soal waktu masuk kantor tetapi kedisiplinan terhadap SOP (memastikan izin keluar sesuai SOP), kerjasama yang baik, serta komitmen bersama di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
2. Adanya semangat dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai
3. Terjalinnnya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun di pusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja.

5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.
6. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mengurangi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah-langkah dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja agar lebih fokus dan komprehensif.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama pada jajaran pemerintah daerah dalam penyelesaian berbagai kebijakan dan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada serta merencanakan pengadaan sarana pendukung lainnya di tahun berikutnya.
6. Pemanfaatan secara maksimal Mal Pelayanan Publik.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian pernyataan kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut akan disajikan data capaian

target kinerja program dan kegiatan tahun 2025

Tabel 3.5
Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran 2025

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		Tingkat Efisiensi (5-8)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	anggaran	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Nilai Investasi yang berkualitas	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83%	66%	83,40%	13.709.130.510	12.075.856.803	12.075.856.802
	Program Pengembangan iklim	90%	95%	104,40%	494.622.150	490.291.948	490.291.853
	Program Promosi Penanaman Modal	100%	312%	312,37%	279.908.85	265.965.484	265.965.483
	Program Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal	55%	81,93%	148%	145.928.450	140.212.034	140.212.033
	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	92%	96%	104%	68.065.250	65.220.930	65.220.834
	Program Pelayanan Penanaman Modal	95%	94,13%	101%	281.903.700	274.283.182	274.283.181

Berdasarkan tabel di atas Program Promosi Penanaman Modal mempunyai capaian capaian yang besar yaitu 312,7 % hal ini menunjukkan strategi dan publikasi potensi Daerah berjalan lebih efektif dari yang di rencanakan meskimenggunakan anggaran Rp. 265.965.484,- Program Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal juga mempunyai nilai capaian yang besar yaitu 148% pengawasan dan fasilitasi terhadap hambatan Investor dilapangan dilakukan secara intensif untuk menjaga kualitas investasi, Reformasi dan Birokrasi yang mempunyai indikator Kinerja yaitu Nilai SAKIP mempunyai nilai Realisasi 83,40% dari target 80% hal ini membuat DPMPTSP memiliki Predikat A dalam SAKIP Awort Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah, Program Palayanan Penanaman Modal dan dan Program Pengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal telah mencapai angka di atas 100%, secara pelayanan sudah sangat baik namun masih perlu penguatan administrasi atau regulasi birokrasi secara keseluruhan.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis ini merupakan bagian penting dalam laporan akintabilitas kinerja karena untuk memetakan sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap target organisasi. DPMPTSP Sulawesi Tengah

memiliki 5 Program 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 untuk menunjang pencapaian target, berikutan akan disajikan data capaian target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 3.6
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi
1	2	3	4	5		6		7	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROVINSI	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80	13.709.130.510	66%	12.075.856.803	82,45%	88,09%
Program Pengembangan Iklim	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Serta Daya Tarik Investasi	Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	90	494.622.150	95%	490.291.948	104,40%	99,12%
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Serta Daya Tarik Investasi	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	%	100	279.908.850	312%	265.965.484	312,37%	95,02%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Serta Daya Tarik Investasi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA/PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	%	55%	145.928.450	81,93%	140.212.034	81,93%	96,08%
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Serta Daya Tarik Investasi	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	%	92%	68.065.250	96%	65.220.930	104%	95,82%

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROVINSI

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indikator Program yaitu penunjang urusan daerah Provinsi dan indikator program yaitu Nilai SAKIP dan presentasi Realisasi Anggaran. Dengan kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan

pemerintah daerah, Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah dan mempunyai indikator kinerja yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, tersedianya laporan barang dan jasa, tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya dokumen keuangan, Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah. Anggaran kegiatan ini pada T.A. 20245 sebesar Rp. 494.622.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 490.291.948,-

II. Program Pengembangan Iklim

Dalam rangka mewujudkan realisasi investasi di daerah Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah, mengambil peran yang strategis dengan cara mengkaji dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi. Indikator dari program ini yaitu persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insentif investor.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi dengan investor di Parigi mautong, Kegiatan pelaksanaan kunjungan lapangan di perusahaan terkait kemitraan Usaha di Kabupaten Donggala, peninjauan mitra usaha potensial pada kelautan dan perikanan di Kabupaten Donggala, dan kegiatan FGD 1 penyusunan Pergub Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2025-2045 di Kota Palu. Fasilitas kemitraan antara pelaku Usaha Besar dan UMKM serta penyesuaian regulasi terkait hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha

terhadap penyesuaian PP 28 tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko dan Uji Publik PERGUB RUPM 2025-2035.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut yaitu terjalinnya MOU atau Perjanjian Kerja antara Usaha Besar dengan UMKM/Koprasi di Kabupaten Parigi Mautong dan Donggala, tersedianya data mitra usaha potensial khususnya pada sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Donggala yang siap dikerjasamakan dengan investor, adanya solusi teknis hambatan pelaku usaha dalam mengimplementasikan **PP Nomor 5 Tahun 2021** (tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko) dan peraturan turunannya.

Harapan yang diinginkan merupakan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Terciptanya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan di mana kehadiran investor besar tidak mematikan usaha lokal melainkan memperkuat rantai pasok nasional melalui UMKM, dengan adanya Pergub RUPM 2025-2045 investor memiliki pandangan yang jelas mengenai arahan kebijakan dan sektor prioritas di Sulawesi Tengah selama 20 tahun kedepan, UMKM dan Koprasi diharapkan dapat naik kelas melui transfer teknologi , pengetahuan manajemen dan akses pasar yang diberikan oleh mitra usaha besar. Peningkatan Realisasi Investasi di harapkan dapat megurangi hambatan birokrasi sehingga minat investor untuk menanamkan modalnya terus meningkat seiring kemudahan perizinan, kehadiran Ekonomi Daerah khususnya di sektor Kelautan dan Perikanan dapat diharapkan terjadi hilirisasi produk yang dikelola secara kolaboratif dapat meningkatkan tambahan bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Formulasi Perhitungan Pada Indikator Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yaitu Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah ditindaklanjuti DIBAGI Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang masuk DIKALI 100%, Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia dengan formalis perhitungan yaitu Dokumen Perencanaan Peluang

Investasi yang telah disusun DIBAGI target dokumen perencanaan peluang investasi DIKALI 100%

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikan 93% dengan keluaran berupa 2 (dua) Dokumen/laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha. Anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 494.622.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 490.291.948,- atau 99.40%. Target indikator kinerja yaitu sebesar 90%, realisasi yaitu 95%

dan capaian kinerja kegiatan ini sebesar 94.74%.

Program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pertama kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kedua adalah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas 2 sub kegiatan.

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha.

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikan dengan keluaran berupa 3 (tiga) laporan/dokumen Deregulasi dan Kebijakan Pemberian

Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 93.778.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.212.274,- atau 100%. Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan (b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal mempunyai indikator kinerja yaitu Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Sub kegiatan ini menitikberatkan pada penyusunan RAPERGUB Sulawesi Tengah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan target kinerja 1 dokumen dan dapat direalisasikan sehingga capaiannya 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 10.103.700,- dengan realisasi Rp. 10.103.700,- atau 100%.

b. Sub Kegiatan Fasilitas Yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi

Sub Kegiatan Fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.

Sub Kegiatan ini mempunyai fungsi untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan pelayanan public. Kegiatan Fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi mempunyai target kinerja 2 dokumen dan dapat direalisasikan sehingga capaiannya sebesar 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 64.090.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.844.004,- atau 99.62%

c. Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. Target indikator sub kegiatan ini dapat direalisasikan, dimana dalam sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terdapat 1 kegiatan usaha yang memperoleh

insentif dan kemudahan berusaha di daerah. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 19.584.850,- dengan realisasi Rp. 19.264.570,- atau 98.36%.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi ini mempunyai indikator kegiatan yaitu jumlah dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial. Target kegiatan ini dapat dicapai 2 Dokumen, dimana dalam kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dihasilkan 2 (dua) dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 400.843.25,- dengan realisasi Rp. 397.079.674,- atau 99.06%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, dan (b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi mempunyai indikator yaitu Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Desk Penyusunan RUPM bagi kabupaten/kota dan melaksanakan FGD Penyusunan Perencanaan Kawasan Investasi UMKM, Regulasi, dan Kemitraan Usaha kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat dicapai dengan keluaran 1 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 219.157.250,- dengan realisasi Rp. 215.703.776,- atau 98.42%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha

Provinsi memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi.

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Evaluasi Kemitraan Usaha antara UMKM dan Investor kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat mencapai 1 Dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 181.686.000,- dengan realisasi Rp. 181.375.898,- atau 99.83%.

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program Promosi Penanaman Modal adalah program yang mengkaji dan menghasilkan pemahaman yang sinergi serta peningkatan kualitas dalam melakukan promosi penanaman modal. Program ini mempunyai sasaran strategis yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator yaitu persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan Pameran Sulteng Nambaso Tahun 2025 di lakukan di Kota Palu, Pameran Asosiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (APPSI) PBJ di DKI Jakarta dan kegiatan Pameran STQ Nasional yang ke - 29 di laksanakan di Kendari, penyusunan pemetaan Potensi Investasi Berbasis GIS dan Forum Bisnis serta kegiatan Even Pameran lainnya.

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dan tantang yaitu pelaksanaan pameran luar daerah (seperti DKI Jakarta dan Kendari) memerlukan biaya logistik yang besar dan koordinasi lintas Provinsi yang kompleks untuk memastikan produk unggulan tiba dalam kondisi prima,

selain itu belum meratanya pemahaman pelaku usaha lokal mengenai sistem perizinan digital dan promosi investasi berbasis data spasial, seringkali sulit menjaga keberlanjutan interaksi antara investor dan pelaku usaha setelah acara berakhir

Kegiatan yang dirancang dengan tujuan untuk masa depan Sulawesi Tengah yg lebih maju, harapan yang di inginkan setelah terlaksananya kegiatan tersebut yaitu investor dapat melihat potensi sumber daya alam (seperti Kelautan dan mineral) secara visual dan transparan sehingga mempercepat pengambilan keputusan investasi, Even Sulteng Nambaso diharapkan mampu mengangakai identitas budaya dan produksi lokal ke kancah Nasional sekaligus membangkitkan kebanggaan masyarakat lokal terhadap potensi daerahnya, melalui Pameran APPSI di Jakarta produk unggulan Sulawesi Tengah diharapkan dapat menembus pasar ritel Nasional dan mendapatkan mitra distribusi skala besar, Forum Bisnis diharapkan tidak hanya menghasilkan MOU diatas kertas tetapi juga realisasi investasi nyata yang menyerap tenaga kerja lokal dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada bulan Januari – Desember 2025 tercatat jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan sebanyak 29.662. Pagu anggaran program ini pada T.A. 2025 Rp. 279.908.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 265.965.484,- atau 95.02%. Target indikator kinerja yaitu sebesar 100%, realisasi yaitu 312.73% dan capaian kinerja kegiatan ini 312.73%.

Target indikator program promosi penanaman modal yaitu 2 (dua) Dokumen dengan indikator jumlah dokumen strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi. Formulasi Perhitungan Pada Indikator program Promosi Penanaman Modal yaitu Jumlah Peminat dari Promosi Investasi DiBAGI Target Sasaran Promosi Investasi DIKALI 100%

Program promosi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki Indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal.

Target indikator kegiatan yaitu 2 (dua) laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 2 (dua) laporan, T.A. 2025 sebesar Rp. 279.908.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 265.965.484,- atau 95.02%.

Kegiatan ini mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi; dan (b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi memiliki Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi. Target indikator sub kegiatan dapat dicapai 2 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A 2025 sebesar Rp. 237.508.650,- dengan realisasi sebesar Rp 225.808.784,- atau 95.07%.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi substansinya adalah

mengikuti dan melaksanakan pameran dalam dan luar daerah yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana pameran. Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi. Event pameran dalam daerah yang dibuat DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengundang DPMPTSP kabupaten/kota dan mengikutsertakan seluruh ODP di

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yaitu sulteng ekspose d mana DPMPTS menjadi tuan rumah dari kegiatan tersebut. Target indikator sub kegiatan yaitu 1 (satu) dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 1 (satu) laporan, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 42.400.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.156.700,- atau 94.71%.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator program yaitu Persentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Target Pemerintah Pusat.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Bimtek yang dilaksanakan sebanyak 4x (Empat) dengan jumlah peserta masing-masing 60 Orang dengan total 240 Orang selama 2025 yang dilaksanakan di Kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah, Pengawasan Inspeksi Lapangan dilaksanakan di 13 Perusahaan dengan total 36 Orang dilaksanakan di Kabupaten Morowali 1x (satu), Kabupaten Donggal 4x (empat), Kabupaten Parigi Mautong 5x (lima), Kabupaten Sigi 3x (tiga), dan Kota Palu. Pelaksanaan pengawasan perizinan bagi pelaku usaha dan pelaksanaan bimtek pelaporan LKPM bagi pelaku usaha.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya antara lain sebagian peserta Bimtek masih mengalami kesulitan teknis dalam mengoperasikan sistem OSS RBA dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri, Pelaksanaan inspeksi lapangan di wilayah yang luas memerlukan manajemen waktu dan biaya yang tinggi mengingat jarak antara titik lokasi yang cukup jauh, sering ditemukan ketidaksesuaian antara data investasi yang dilaporkan

pelaku usaha dalam LKPM dengan kondisi riil di lapangan saat inspeksi dilakukan

Melalui penguatan kapasitas dan pengawasan yang telah dilakukan, diharapkan pelaku usaha semakin disiplin dalam menyampaikan LKPM secara rutin setiap triwulan sehingga data realisasi investasi daerah menjadi lebih akurat sesuai harapan, hasil inspeksi lapangan dapat memvalidasi nilai realisasi yang sebenarnya sehingga kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terukur dengan jelas, Bimtek yang intensif diharapkan mampu menghilangkan kendala administratif bagi pelaku usaha yang akan mendorong percepatan realisasi Investasi di Sulawesi Tengah, terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pengusaha melalui forum Bimtek agar regulasi perizinan tidak lagi menjadi hambatan, diharapkan wilayah seperti Kabupaten Morowali, Kabupaten Donggala dan kabupaten Parigi Mautong mampu memastikan investasi yang selaras dengan pelestarian lingkungan.

Target indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100% mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat adapun Formulasi Perhitungan Pada Indikator program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang Melapor LKPM DIBAGI Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN DIKALI 100%

. Pada tahun 2025, Kementerian Investasi (BKPM) menetapkan target realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 162.57 Triliun. target ini dapat dicapai dengan realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah sebesar Rp. 127.18 Triliun. Sehingga capaian indikator program sampai adalah 90.86%. Pagu anggaran program pada T.A. 2025 sebesar Rp. 281.903.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 274.283.182,- atau 97.30%. Target indikator kinerja yaitu sebesar 55%, realisasi yaitu 81.93% dan capaian kinerja kegiatan ini

148%.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan.

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan melakukan fungsi pemantauan, pembinaan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal.

Target indikator kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yaitu Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang menyampaikan LKPM dengan target kinerja yaitu 1.173 Pelaku Usaha. Jumlah realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 sampai dengan bulan Desember sebesar adalah Rp. 127,18 Triliun,- dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang terserap sebanyak 18 orang.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar sebesar Rp. 145.928.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 140.212.034,- atau 96.08%.

Kegiatan ini mempunyai 3 sub kegiatan yaitu (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; (2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Modal memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha dari

Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 12 kegiatan usaha yang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 103.789.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.722.480,- atau 95.12%.

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan teknis perizinan/pengaawasan berusaha berbasis risiko serta penyelesaian permasalahan penanaman modal. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Target indikator sub Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha adalah 240 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 37.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.677.564,- atau 98.86%.

c. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya

Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya memiliki indikator yaitu jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya.

Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 12 kegiatan usaha yang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 103.789.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.722.480,- atau 95.12%.

d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan teknis perizinan/pengaawasan berusaha berbasis risiko serta penyelesaian permasalahan penanaman modal. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Target indikator sub Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha adalah 240 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 37.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.677.564,- atau 98.86%.

e. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya

Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya memiliki indikator yaitu jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya.

Target indikator kinerja sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya adalah 20 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 5.038.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.811.990,- atau 95.50%.

V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan dan perizinan penanaman modal. Sasaran strategisnya adalah Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel. Indikator program ini adalah Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan klinik pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) tahun 2025 di Kabupaten Banggai, penerbitan NIB bagi pelaku usaha serta konsultasi Publik Evaluasi SP dan SOP Perizinan dan Non Perizinan.

Dari rangkaian kegiatan Klinik Pendampingan NIB, Penerbitan Izin, serta Evaluasi Standar Pelayanan (SP/SOP) yang telah dilakukan maka hambatan yang di hadapi yaitu : masih adanya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengalami keterbatasan perangkat untuk mengakses sistem OSS secara mandiri saat pembuatan NIB, banyak pelaku usaha yang ingin memiliki NIB tetapi belum memahami atau memiliki persyaratan dasar seperti ketersediaan tata ruang (KKPR) atau persetujuan lingkungan, dalam konsultasi publik sering ditemukan pelaku usaha yang ingin proses serba cepat dengan aturan birokrasi /regulasi yang wajib dipenuhi oleh petugas.

Harapan yang di inginkan setelah dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu antara lain: Meningkatnya jumlah pelaku usaha di Kabupaten Banggai yang memiliki **NIB**, sehingga mereka memiliki kepastian hukum dan akses lebih mudah ke perbankan atau bantuan pemerintah, Melalui evaluasi **SP dan SOP**, diharapkan tercipta standar pelayanan yang lebih ramping, transparan, dan memiliki kepastian waktu serta biaya (pangkas birokrasi), Konsultasi publik diharapkan menghasilkan standar pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kritik serta masukan langsung dari masyarakat/pelaku usaha, Harapan agar petugas perizinan memiliki pemahaman yang seragam mengenai SOP baru, sehingga meminimalisir terjadinya maladminstrasi dalam penerbitan izin maupun non-izin, Dengan banyaknya NIB yang diterbitkan, pemerintah daerah memiliki basis data pelaku usaha yang akurat untuk pemetaan kebijakan ekonomi di masa depan.

Program ini mempunyai target indikator persentase pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93%. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan DPMPTSP pada tahun 2025 memberikan hasil IKM 94.13% yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Nilai Interval Konversinya berkisar antara 88,30 – 100,00 yang berarti mutu pelayanan nilai “A” dan kerjanunit pelayanan (DPMPTSP) dipersepsikan “Sangat Baik” oleh masyarakat penggunaanya, sehingga capaian indikator program ini adalah 97.30%. Pagu anggaran program ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 281.903.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 274.283.182,- atau 97.30 %. Target indikator kinerja yaitu sebesar 93%, realisasi yaitu 94.13% dan capaian kinerja kegiatan ini 97.30%.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kedua kegiatan tersebut masing-masing terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan. Pada Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Presentase Pelaku usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan

dengan formalisasi jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin dan nonizin DiBAGI JUmlah Pelaku Usaha yang mengurus perizinan dan nonPeizinan DIKALI 100%, Indikator Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Perizinan dengan Formalasi Perhitungan yaitu Pengaduan penyelenggaraan Pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti DiBAGI Pengaduan penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang masuk DIKALI 100%

1. Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Target indikator kegiatan berupa jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 2 (Dua) dokumen/laporan dapat dipenuhi, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 241.903.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 234.283.182,- atau 96.85%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dan (2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

a. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sub kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kabupaten/kota dan berusaha berbasis risiko di kabupaten/kota dan

berusaha berbasis risiko di kabupaten/kota dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota bagi pelaku usaha.

Sub kegiatan ini memiliki target 1000 kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota. Capaian indikator sub kegiatan ini adalah 943 Keg. Usaha.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 174.890.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.522.875,- atau 96.93%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Target indikator sub kegiatan yaitu 30 Pelaku Usaha yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota. Target indikator sub kegiatan ini dapat terealisasi dengan capaian realisasi 272 Pelaku Usaha. Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A. 2025 sebesar Rp. 40.634.650,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.403.195,- atau 96.79%.

2. Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT. Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen/laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP. Target

indikator kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen laporan perizinan dan non - perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP dapat direalisasikan sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan usaha dengan aplikasi/berbasis IT, diantaranya dengan melaksanakan workshop OSS bagi pelaku usaha UMK dan Non UMK. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 1.025 Pelaku Usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan provinsi. Target ini dapat terealisasi dengan jumlah pelaku usaha yang mendapat layanan, sehingga capaian indikator sub kegiatan ini adalah 1.444 Pelaku Usaha. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 174.890.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.522.875,- atau 96.93%.

b. Sub Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah memiliki indikator memiliki indikator yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Target ini dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini yaitu 85%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%.

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah program yang menyediakan data laporan penanaman modal dan data perizinan non perizinan beserta informasi penanaman modal. Sasarannya adalah Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini memiliki indikator yaitu persentase data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan koordinasi Data Penanaman modal di Kabupaten Parigi Mautong, Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Data Penanaman Modal di Kabupaten Poso, dan Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Data Penanaman Modal di Kabupaten Donggala.

Dalam melakukan sinkronisasi data antar kabupaten, beberapa kendala teknis dan administratif yang sering muncul hambatan seperti Adanya perbedaan antara data realisasi investasi yang tercatat di sistem OSS RBA dengan data manual yang dimiliki oleh DPMPTSP kabupaten, Masih ditemukan pelaku usaha di daerah (terutama di sektor perkebunan dan kelautan) yang belum rutin melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga data yang disinkronkan menjadi tidak lengkap, Keterbatasan jumlah personil di tingkat kabupaten yang menguasai analisis data investasi berbasis sistem yang

menghambat kecepatan proses evaluasi, Kesulitan dalam memverifikasi data investasi secara fisik di lokasi yang secara geografis sulit dijangkau di wilayah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai standar tata kelola data yang lebih baik, dengan harapan sebagai berikut: terciptanya integrasi data yang akurat dan selaras antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk menghindari tumpang tindih informasi, Meningkatnya nilai realisasi investasi yang terdata secara resmi yang nantinya akan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, Hasil evaluasi data ini diharapkan menjadi dasar bagi Gubernur dan Bupati dalam menyusun strategi promosi investasi yang lebih tepat sasaran di masing-masing wilayah, Dengan data yang transparan dan terverifikasi melalui proses sinkronisasi, diharapkan calon investor merasa lebih aman dan yakin untuk menanamkan modal di Sulawesi Tengah.

Indikator program ini menargetkan Persentase data penanaman modal dan perizinan - non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan kedalam sistem informasi penanaman modal sebanyak 92%, realisasi yaitu 96% dan capaian kinerja kegiatan ini %. data penanaman modal dan perizinan-non perizinan dikelola dan dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal. Data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola dan dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal pada tahun 2025 dapat direalisasikan sebanyak 94%, sehingga capaian indikator program ini adalah 104.35%. Pagu anggaran program pada T.A. 2025 sebesar Rp. 68.065.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.220.930,- atau 95.82%

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan 1 (satu) Sub Kegiatan.

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi ini dilaksanakan dengan melakukan analisis dan evaluasi data, yang terintegrasi dalam satu basis data. Indikator kegiatan adalah jumlah laporan data

penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah.

Sebagai hasilnya disusun 3 (Tiga) Dokumen data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah. Sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 68.065.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.220.930,- atau 95.82%.

Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dalam rangka perbaruan (*updating*) data investasi. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

Indikator sub kegiatan ini menargetkan 3 (Tiga) dokumen yang berisi data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Data tersebut disusun dalam bentuk Direktori PMA/PMDN Tahun 2025. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini adalah 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 68.065.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.220.930,- atau 95.82%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP dilaksanakan melalui 5 program. Sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi dilaksanakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sementara sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, atau dapat dihitung dengan rumus sebagai

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				pagu Anggaran		Capaian Kinerja X Pagu Anggaran	7-8
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Nilai Investasi Yang Berkualitas	Program Pengembangan Iklim	Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	90%	95%	106%	494,622,150	90,291,948	522,101,158	404,330,202
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Feminat Investasi dari Kegiatan Promosi	100%	312%	312%	279,908,850	848,984,525	873,315,612	(569,075,675)
	Program Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA/PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	55%	81.93%	149%	45,928,450	140,212,034	45,928,451	(94,283,584)
	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Feminat Investasi dari Kegiatan Promosi	92%	96%	104%	68,065,250	65,220,930	68,065,251	2,844,320
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	93%	94.13%	101%	281,903,700	274,283,182	285,328,982	7,620,518

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.8, maka diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan DPMPTSP dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan, total anggaran DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp. 14.940.523.592,-. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.204.827.568,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.719.209.752,- dan Belanja Modal Rp. 55.521.590,- dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 54.667.500,- atau 98,46 Belanja Pegawai dapat direalisasi sebesar Rp. 6.105.259.195,- atau 84.81% Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 4.602.161.736 atau 97.52%,-. Sehingga total anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 13.258.454.841,- atau 88,745. Realisasi keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025

Nomor	U R A I A N	Total Pagu	Realisasi Keuangan		S I L F A
			Rp	%	Rp
2:18:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.709.130.510	12.075.856.803	88,09%	1.633.273.707
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.677.600	39.606.503	94,81	24.071.097
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	388.545.350	367.291.941	94,53	21.253.409
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	26.716.700	26.194.496	98,05	522.204
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.415.550	46.120.066	95,26	2.295.484
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.592.141.218	10.028.413.244	86,51	1.563.727.974,87
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	10.204.827.568	8.655.001.145	84,81	1.549.826.423,87
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.156.440.000	1.146.840.000	99,17	9.600.000
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	14.997.000	14.997.000	95,82	626.56
2.18.01.1.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	118.024.100	114.948.079	97,39	3.076.021
2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	51.383.400	51.326.500	99,89	56.900

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025 (Lanjutan)

Nomor	URAIAN	Total Pagu	Realisasi Keuangan		SILFA
			Rp	%	Rp
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	87.925.050	82.157.800	93,44	5.767.250
2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	87.925.050	82.157.800	93,44	5.767.250
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.122.200	19.793.739	98,37	328.461
2.18.01.1.05.0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.649.200	9.602.089	99,51	47.111
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.509.900	234.226.990	93,50	16.282.910
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.253.700	32.944.060	99,07	309.640
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.267.200	44.380.360	98,04	886.840
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	171.989.000	156.902.570	91,23	15.086.430
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.521.590	54.667.500	98,46	854.090
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	55.521.590	54.667.500	98,46	854.090
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.257.152	815.810.524	97,91	17.446.628
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	389.976.472	381.161.696	97,74	8.814.776
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.280.680	434.648.828	98,05	8.631.852
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.975.800	401.180.503	98,82	4.795.297
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.389.100	259.830.253	99,02	2.558.847
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	62.226.700	61.695.000	99,15	531.700
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	81.360.000	79.655.250	97,90	1.704.750
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	494.622.150	490.291.948	99,12	4.330.202
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	93.778.900	93.212.274	99,40	566.626
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	10.103.70	10.103.70	100	0
2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi	64.090.350	63.844.004	99,62	246.346
2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	19.584.850	1.264.570	98,36	320.28
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	279.908.850	265.965.484	95,02	13.943.366
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	279.908.850	265.965.484	95,02	13.943.366
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	279.908.850	265.965.484	95,02	13.943.366

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024 (Lanjutan)

Nomor	URAIAN	Total Pagu	Realisasi Keuangan		SILFA
			Rp	%	Rp
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	42.400.200	40.156.700	94,71	2.243.500
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	281.903.700	274.283.182	97,30	7.620.518
2.18.04.1.01	Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	241.903.700	234.283.182	96,85	7.620.518
2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	174.890.400	169.522.875	96,93	5.367.525
2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40.634.650	40.403.195	99,43	231.455
2.18.04.1.01.0007	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	26.378.650	24.357.112	92,34	2.021.538
2.18.04.1.02	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	40.000.000	40.000.000	100	0.000
2.18.04.1.02.0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40.000.000	40.000.000	100	0
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	145.928.450	140.212.034	96,08	5.716.416
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	145.928.450	140.212.034	96,08	5.716.416
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	103.789.500	98.722.480	95,12	5.067.020
2.18.01.1.08.0002	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	5.038.950	4.811.990	95,50	226.960
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	37.100.000	36.677.564	98,86	422.436
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	68.065.250	65.220.930	95,82	2.844.320
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	68.065.250	65.220.930	95,82	2.844.320
	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	68.065.250	65.220.930	95,82	2.844.320

Sisa anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.682.068.751,- atau dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa belanja Gaji Pegawai/Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 1.066.229.065,-
2. Sisa belanja barang jasa sebesar Rp. 117.048.016,-
3. Sisa belanja modal hasil negosiasi harga sebesar Rp. 854.090

3.3 INOVASI

DPMPTSP Sulawesi Tengah berfokus pada digitalisasi layanan dan penguatan iklim investasi melalui pendekatan strategis yang terintegritas, Banua investasi yang dirancang untuk mendorong pelayanan prima serta mengintegrasikan layanan perizinan dengan optimalisasi potensi investasi daerah secara efektif, Layanan INKLING (Inovasi Keliling) merupakan inovasi jemput bola untuk memberikan pelayanan perizinan secara langsung di lapangan sehingga mempermudah pelaku usaha khususnya UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha tanpa harus datang kekantor Dinas, inovasi selanjutnya yaitu Digitalisasi dan Pengawasan Terintegritas dalam metode pengawasan perizinan fokus utamanya ada 2 (dua) yaitu Bimtek OSS RBA dan Aplikasi Mandiri, Bimtek OSS RBA merupakan Bimbingan teknis rutin bagi pelaku usaha berbasis resiko agar lebih transparan dan cepat sedangkan Aplikasi Mandiri berupa pembagian platform wab dan system informasi pendukung guna meminimalkan hambatan birokrasi bagi investor.

3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP yang diperoleh pada tahun 2004 sebagai berikut :

1. Predikat A dalam SAKIP Award 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah



2. penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025) dengan nilai 97,89 - Zona Hijau - Kualitas Tertinggi Stand Terbaik 3 Pada Indonesia Maju Exspo dan Forum 2024



3. Mendapatkan Presikan Sangat Baik atas penilaian kinerja pelayan Penghargaan Mitra Asesment Bank Indonesia Sulawesi Tengah Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas Kontribusi Pelaksanaan Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah di Sulawesi Tengah.



4. Peringkat 5 pada Penganugrahaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. dengan nilai 93 sebagai Organisasi Perangkat Daerah Informatif



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, sebagai berikut:

1. Target Indikator Kinerja DPMPTSP pada tahun 2025 belum dapat tercapai dikarenakan Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply & Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru, Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal global dan Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada sistem OSS RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia) walaupun target indikator belum tercapai tetapi Sulawesi Tengah masuk dalam 5 (lima) besar Nasional dan Sulteng juga berada di posisi pertama untuk Investasi Hilirisasi dengan nilai mencapai 110 triliun
2. Realisasi investasi di tahun 2025 mencapai Rp. 127,209,764, triliun atau 90.86% Jumlah investor berskala nasional tahun 2025

adalah 2700 proyek atau sebesar 98.18%, Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN mencapai 7,992 Milyar rupiah atau sebesar 173.735 dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja sejumlah 18 orang/Perusahaan atau 35.12%

3. Realisasi keuangan tahun 2025 adalah Rp. 13.311.830.381,- atau 88.87% dan realisasi fisik 100%.
4. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2024 sebanyak 4 (empat) yaitu Predikat A dalam SAKIP Award 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 1. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024) dengan nilai 97,89 - Zona Hijau - Kualitas Tertinggi, Penghargaan Mitra Tengah tahun 2025. dengan nilai 93 sebagai Organisasi Perangkat Asesment Bank Indonesia Sulawesi Tengah Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas Kontribusi Pelaksanaan Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah di Sulawesi Tengah dan Peringkat 5 pada Penganugrahaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Daerah Informatif.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam rangka perbaikan penyusunan rencana kinerja di tahun yang akan datang antara lain sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Bidang Penanaman Modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya dana.
3. Perlu adanya ketepatan dalam penentuan indikator dan target kinerja dari masing-masing kegiatan.
4. Peningkatan kapasitas melalui Bimtek atau pelatihan khusus untuk mendukung efektivitas sistem pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun, dan semoga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan DPMPTSP T.A. 2025 dan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Palu, 01 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	140.000.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2.750
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	4.600
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja(Orang/Perusahaan)	51

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.974.405.189,00	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 479.604.000,00	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 201.384.300,00	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 123.978.450,00	APBD
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 68.065.300,00	APBD
6. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 162.624.950,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 15.010.062.189,00	

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP19710423 200003 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 SEPTEMBER 2025
PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19720902 200003 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal - Meningkatkan kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan - Meningkatkan Kualitas administrasi Keuangan Perangkat daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah - Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) - Meningkatkan Pengawasan Kearsipan Internal - Meningkatkan Kematangan SPBE Perangkat Daerah - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan - Meningkatkan Kualitas Produk Hukum dan tindak lanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah - Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan - Meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Persentasi Realisasi Anggaran - Jumlah Laporan Pengelola Barang Milik Daerah - Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dan Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN - Nilai capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI - Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah - Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa - Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah dan Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor - Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat PTSP	68 Indeks 86 Nilai 97% 1 Lap 1 Lap 100% 100% 100% 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100%

PROGRAM & KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN APBD
		Rp.		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	13.974.405.189	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	238.846.300	
	TOTAL	Rp.	238.846.300	

1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	12.155.378.322
2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	24.525.050

TOTAL	Rp.	12.179.903.372
--------------	------------	-----------------------

1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	59.822.200
2 Kegiatan Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	211.083.600
3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	11.982.000
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp.	892.331.917
5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	380.435.800

TOTAL	Rp.	1.555.655.517
--------------	------------	----------------------

TOTAL ANGGARAN

Rp. 13.974.405.189
Palu, 22 september 2025
Sekretaris

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
Nip. 19720902 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFDHALIA, SE., MM
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BIDANG PERENCANAAN
IKLIM PENANAMAN MODAL


AFDHALIA, SE., MM
Pembina IV/a
Nip. 19740928 200212 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
 UNIT KERJA : BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Investasi Sulawesi Tengah - Meningkatkan Kualitas Informasi Potensi Investasi - Meningkatkan Fasilitas Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Investasi	100%
		- Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia	100%
		- Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	100%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

KET

Rp. 479.604.000

APBD

Rp. 76.450.900

Rp. 403.153.100

479.604.000

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
 Pjt. Kepala Bidang
 Perencanaan & Pengembangan Iklim

AFDHAZIA SE MM

Pembina IV/a
 Nip. 19740928 200212 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 September 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19690320 200003 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Kualitas Strategi Promosi Penanaman Modal	100%
	- Meningkatkan Akses Informasi Potensi Investasi	- Persentase Informasi Potensi Investasi yang dapat diakses	100%
	- Meningkatkan Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	- Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	100%

PROGRAM, KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1 Program Promosi Penanaman Modal

Rp. 201.384.300

APBD

1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Rp. 201.384.300

TOTAL ANGGARAN

201.384.300

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 22 september 2025
 Kepala Bidang
 Promosi Penanaman Modal

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19690320 200003 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OSIANA, SH.,M.Si
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

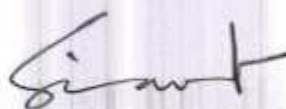
Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Plt.KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002


OSIANA, SH.,M.Si
Pembina
Nip. 19721027 200212 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No. (1)	Sasaran Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Data & Informasi Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan - Meningkatnya Kualitas Data PMA dan PMDN - Meningkatnya Pengelolaan Data Nomor Izin Berusaha (NIB), Data Proyek dan Stok - Meningkatnya Kualitas Analisa Data PMA dan PMDN Kabupaten/ Kota Prov. Sulteng	Persentase Kualitas Data & Informasi Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan - Persentase Kualitas Data PMA dan PMDN - Persentase Pengelolaan Data Nomor Izin Berusaha (NIB), Data Proyek dan Stok Investasi Tahun Berjalan di Prov. Sulteng - Persentase Kualitas Analisa Data PMA dan PMDN Kabupaten Kota Prov. Sulteng	100% 100% 100% 100%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1 Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

KET

Rp. 68.065.300

Rp. 68.065.300

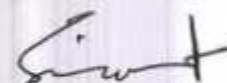
68.065.300

APBD

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
 Plt.Kepala Bidang
 Pengolahan Data dan Informasi
 Penanaman Modal



OSIANA, SH., M.Si
 Pembina

Nip. 19721027 200212 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVAL A, SE.,MM
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

PILKEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

NOVAL A, SE.,MM
Pembina IV/a
Nip. 19761024 200502 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal - Meningkatkan pengawasan terhadap proyek PMDN - Meningkatkan Pelaksanaan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Investasi - Meningkatkan pemantauan terhadap proyek PMDN - Meningkatkan Pembinaan Pelaku Usaha PMDN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMDN terhadap ketentuan Penanaman Modal	67%
		- Persentase proyek PMDN yang dilakukan pengawasan	0,04%
		- Persentase Fasilitas Permintaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Investasi	100%
		- Persentase proyek PMDN yang dilakukan pemantauan	22%
		- Persentase Pelaku Usaha PMDN yang diberikan pembinaan	28%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Rp. 123.978.450
 APBD

1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewewenangan Daerah Provinsi

Rp. 123.978.450

TOTAL ANGGARAN

Rp. 123.978.450

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
 Plt. Kepala Bidang
 Pengendalian Pelaksanaan PM

NOVAL A. SE., MM
 Pembina IV/a
 Nip. 19761024 200502 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

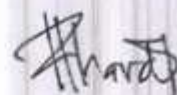
PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

Plt.KEPALA BIDANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19741028 200112 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - Meningkatkan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi	100%
		- Persentase Permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan terverifikasi dan terbit otomatis	100%

PROGRAM, KEGIATAN

Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang - undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

ANGGARAN	KET
Rp. 109.660.650	APBD
Rp. 109.660.650	
Rp. 89.660.650	
Rp. 20.000.000	
Rp. 109.660.650	

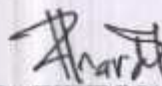
TOTAL ANGGARAN

Palu, 22 september 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

Pt.Kepala Bidang
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &
 Non Perizinan

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002


ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
 Pembina (IV/a)
 Nip. 19741028 200112 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG
PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
PELAPORAN LAYANAN


SISKI, S.Sos, M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19671107 198903 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No. (1)	Sasaran Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non perizinan - Meningkatnya layanan konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan - Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	Persentase Kualitas Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan - Persentase layanan konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan - Persentase Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	100% 100% 100%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1 Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

	ANGGARAN	KET
Rp.	52.964.300	
Rp.	52.964.300	APBD
Rp.	40.634.650	
Rp.	12.329.650	

TOTAL ANGGARAN

Rp. 52.964.300
 Palu, 22 September 2025
 Kepala Bidang
 Pengaduan, Kebijakan dan
 Pelaporan Layanan

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

SISKA, S.Sos., M.Si
 Pembina Tkt I

Nip. 19671107 198903 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIK ERNAWATI, SE., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

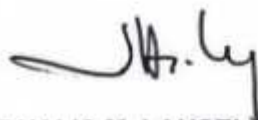
Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH



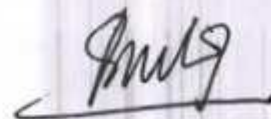
NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd

Pembina Tkt. I

Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET



TITIK ERNAWATI, SE., MM

Pembina

Nip. 19690511 199003 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	- Terverifikasinya Dokumen Pertanggung Jawaban	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	305 Dokumen
	- Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP. (Tersusunnya Dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	ASN 100 Orang/Bln
	- Tersusunnya Dokumen Bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
	- Tersedianya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapotran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	- Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran skpd dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan
	- Tersusunnya dokumen Rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan
2			

SUB KEGIATAN

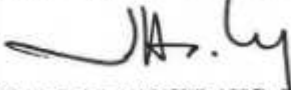
ANGGARAN

KETERANGAN

1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	10.360.330.672	APBD
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	1.678.320.000	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	14.997.000	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	37.028.100	
5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.	18.233.400	
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp.	46.469.150	
7	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	24.525.050	
TOTAL ANGGARAN		Rp.	12.179.903.372	

Palu, 22 september 2025

Sekretaris
 Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng


NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I
 Nip. 19720902 200003 1 004

Kepala Sub Bagian
 Keuangan dan Asset


TITIK ERNAWATI, SE.,MM

Pembina
 Nip. 19690511 199003 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE., M.P.W.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

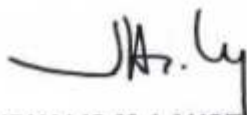
Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH



NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM



IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE. M.P.W.P
Penata Tingkat I
Nip. 19820919 200701 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : SEKRET
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN PROGRAM
 TAHUN ANGGARAN : 2025

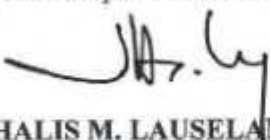
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Tersusunya dokumen bukti dukung dalam E- Sakip Reviu (ESR)Kemenpan	- Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen
	- Tersusunnya dokumen capaian IKU perangkat Daerah	- Jumlah laporan capaian IKU PD	1 Laporan
	- Tersusunya dokumen MR dan Probis	- Jumlah dokumen MR dan Probis yg tersusun	2 laporan
	- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	1 Laporan
	- Terkompilasinya Dokumen Penilaian Kinerja PTSP di Perangkat Daerah Terkait	- Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja PTSP di Perangkat Daerah Terkait yang terkompilasi	1 Laporan

SUB KEGIATAN

		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 179.995,350	APBD
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 25.216.700	
3	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp. 33.634.250	
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 238.846.300	

Palu, 22 september 2025

Sekretaris
 Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng


NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd. M.Pd
 Pembina Tk. I
 Nip. 19720902 200003 1 004

Kepala Sub Bagian
 Program


IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE.,M.P.W.P
 Penata Tingkat I
 Nip. 19820919 200701 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIANTI MAKARAU, ST., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd

Pembina Tkt. I

Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

FEBRIANTI MAKARAU, ST., MM

Penata Tkt. I

Nip. 19810224 200801 2 014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

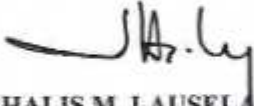
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Terupdatenya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN - Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Jumlah data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN yang terupdate - Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen
			1 Dokumen
			1 Dokumen
			120 Orang
			1 Laporan
2	- Terkompilasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI	- Jumlah Dokumen Penilaian Zona Integritas yang terkompilasi	1 Dokumen
3	- Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah - Terkelolanya arsip statis Perangkat Daerah	- Persentase arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang dikelola - Persentase arsip statis yang dikelola	1 Laporan
			1 Laporan
4	- Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat - Tersedianya data sektoral perangkat daerah.	- Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun - Jumlah laporan data sektoral	1 dokumen
			1 dokumen
5	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket
			1 Paket
6	- Tersusunnya produk hukum (Pergub, PERDA, dll) perangkat daerah - Tertanganinya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor	- Jumlah produk hukum yang disusun - Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti	1 Laporan
			1 Laporan
7	- Tersedianya Kendaraan Perorangan dinas atau Lkendaraan Dinas Jabatan - Tersedianya Mebel - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang disediakan - Jumlah Paket mebel yang disediakan - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit
			41 unit
			11 Unit
8	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Dokumen
			1 Laporan
9	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang - Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	82 unit
			66 Unit
			3 Unit
10	- Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM) - Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun - Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	1 dokumen
			1 dokumen

SUB KEGIATAN**ANGGARAN****KETERANGAN**

1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.	9.649.200	APBD
2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	50.173.000	
TOTAL			59.822.200	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp.	17.606.900	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	36.759.700	
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	156.717.000	
TOTAL			211.083.600	
6	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp.	11.982.000	
TOTAL			11.982.000	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	480.977.352	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	411.354.565	
TOTAL			892.331.917	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	286.599.100	
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	44.956.700	
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	48.880.000	
TOTAL			380.435.800	
TOTAL ANGGARAN		Rp.	1.555.655.517	

Sekretaris
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng


NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 22 september 2025
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum


FEBRIANTI MAKARAU, ST.MM
Penata Tk. I
Nip. 19810224 200801 2 014